



Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan II



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Alun-alun utara No.7 telp. 0334-8780990, fax.0334-887461-885344

E-mail : kominfo@lumajangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Pejabat Eselon II berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Bupati. Untuk itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan II tahun anggaran 2019. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 4 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- Tugas :
Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

- Fungsi :
 1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandiandan statistik sektoral;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandiandan statistik sektoral;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Pada Triwulan II tahun 2019 terdapat perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, yang ditandatangani antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terpadu	Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu	70%
2	Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	80%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu mulai 1 April sampai dengan 30 Juni 2019, capaian dari kedua indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

- Target Triwulan II Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu, telah tercapai sejumlah 10,95% dengan rincian sebagai berikut :

Sistem elektronik terpadu yaitu sistem yang sudah terintegrasi dengan website ppid, website pengaduan, layanan santunan dan akta kematian terpadu, dan website portal berita kabupaten lumajang. Dalam kurun waktu bulan 1 April s.d 30 Juni 2019, sudah tercapai 8 website perangkat daerah

yang terpadu (Website Dinsos, Website Kec. Lumajang, Website Kec. Sukodono, Website Kec. Jatiroto, Website Kec. Tempeh, Website Kec. Pasirian, Website Kec. Candipuro, Website Kec. Kunir).

$$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100\% \implies \frac{8}{73} \times 100\% = 10,95\%$$

- Target Triwulan II Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik, telah tercapai dengan rincian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik}}{\text{Jumlah Badan Publik}} \times 100\% \implies \frac{72}{270} \times 100\% = 26,66\%$$

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terpadu	Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu	17%	10,95%	64,41%
Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	20%	26,66%	133%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 akan diuraikan mengenai program-program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 - Triwulanan II

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	T	R	%	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terpadu	Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu	3.225.933.800	382.268.545	11,85%	17%	10,95%	64,41%	52,56%
2	Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	5.350.606.200	852.546.552	6,28%	20%	26,66%	133%	126,72%
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	919.200.280	316.204.988	34%	24%	24%	100%	66,00%
	2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1.127.472.420	53.220.689	5%	24%	24%	100%	95,00%
	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	9.559.000	923.125	10%	15%	15%	100%	90,00%
	4. Program Pengelolaan Informasi Dan Media Massa	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	1.620.518.500	213.945.885	13%	20%	20%	100%	87,00%

5. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan komunikasi publik	729.031.000	135.246.000	19%	5%	10,2%	204%	185,00%
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan TIK	3.041.153.800	358.858.545	12%	17%	21,68%	127,5%	115,50%
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan data statistik daerah	184.840.000	23.410.000	13%	-	-	-	-
8. Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyebarluasan informasi yang bersandi	84.825.000	31.235.965	37%	15%	16,4%	109,3%	72,30%
9. Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai	860.000.000	101.769.900	12%	24%	0%	0%	-

Capaian target Sasaran Kinerja untuk indikator kesatu yakni Persentase Perangkat Daerah (PD) pengguna sistem elektronik yang terpadu belum mencapai besaran target yang harus dicapai dikarenakan terdapat kendala SDM dan sarana prasarana penunjang pada kecamatan yang akan diintegrasikan, sedangkan realisasi anggaran masih kecil yang disebabkan oleh laporan realisasi anggaran mengacu pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang penerbitannya setelah penyerapan anggaran.

Capaian target Sasaran Kinerja untuk indikator kedua yakni Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik sudah memenuhi besaran target yang harus dicapai pada Triwulanan II tahun anggaran 2019, sedangkan realisasi anggaran masih kecil yang disebabkan oleh laporan realisasi anggaran mengacu pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang penerbitannya setelah penyerapan anggaran.

Capaian penyerapan anggaran di Triwulanan II tahun anggaran 2019 tersebut bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2019, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap upaya pencapaian Sasaran kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	a. Mengadakan pertemuan intensif dengan PPID pembantu perangkat daerah. b. Aktif berkoordinasi dengan para admin PPID	Dilakukan mulai awal April s.d. Juni 2019.

		<p>pembantu perangkat daerah.</p> <p>c. Aktif berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Prov. Jatim dan Komisi Informasi Jatim.</p>	
--	--	--	--

Tabel 2.5.

**Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran**

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terpadu	<p>a. Mengadakan pertemuan intensif dengan perangkat daerah terkait.</p> <p>b. Aktif berkoordinasi dengan Tim Konsultan yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo.</p> <p>c. Aktif berkoordinasi dengan para admin perangkat daerah.</p> <p>d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.</p>	Dilakukan mulai awal April s.d. Desember 2019.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Mengadakan pertemuan intensif dengan perangkat daerah terkait.

3. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov Jatim dan Komisi Informasi Jatim.
4. Aktif berkoordinasi dengan Tim Konsultan dan vendor-vendor bidang TIK.
5. Mengadakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik kepada badan publik tingkat desa.
6. Meningkatkan kapasitas SDM/admin perangkat daerah melalui bimtek.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
 - Laporan kurang baik
 - Laporan segera diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan II Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 (dua) target Sasaran kinerja, sasaran kesatu belum berhasil mencapai target kinerja karena terdapat kendala SDM dan sarana prasarana penunjang pada kecamatan yang akan diintegrasikan. Sedangkan sasaran kedua telah berhasil diwujudkan dengan baik.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 2 target adalah melalui :
 1. Mengadakan pertemuan intensif dengan perangkat daerah terkait.
 2. Aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kominfo Prov Jatim dan Komisi Informasi Jatim.
 3. Aktif berkoordinasi dengan Tim Konsultan dan vendor-vendor bidang TIK.
 4. Mengadakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik kepada badan publik tingkat desa.
 5. Meningkatkan kapasitas SDM/admin perangkat daerah melalui bimtek.
 6. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Lumajang, Juli 2019

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



DEWI SAWITRI, S.Kom

Penata Tk. I

NIP. 19800813 200501 2 016